



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 1831-1843

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perilaku Ekonomi Dalam Pengendalian Anggaran Pada Pemerintahan Kota Semarang

Festi Zulfaturrohmah^{1✉}, Julius Pungky Wasono Widagdo², Kris Brantas Abiprayu³,

Dheasey Amboningtyas⁴

(1,2,3)Universitas Negeri Semarang,

(4) Universitas Pandanaran

Email: shofwan.imam@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi mengenai tingkat keketatan/fleksibilitas pengendalian anggaran yang diterapkan pada pemerintah kota semarang, sehingga defisit atau surplus anggaran dapat dihindari dan kinerja anggaran meningkat. Data diperoleh melalui beberapa metode yaitu survei dengan kuisisioner dan observasi serta verifikasi data arsip anggaran dan laporan realisasi anggaran serta data makroekonomi dari Badan Pusat Statistik Pemerintah Kota Semarang. Selain itu, menganalisis data secara kuantitatif dan kualitatif. Ada tiga tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu 1) Mengetahui apakah Pengendalian Anggaran Ketat berpengaruh terhadap penyimpangan anggaran, 2) Mengetahui apakah Pengendalian Anggaran Ketat memerlukan kebijakan dalam pelaksanaannya, dan 3) Mengetahui seberapa erat kaitannya Pengendalian Anggaran Ketat dengan turbulensi anggaran. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Semarang. Penentuan sampel dilakukan secara purposif berdasarkan pemetaan tipologi wilayah Klassen. Data tersebut diuji untuk mengestimasi model pengukuran dan model struktural, dengan menggunakan metode Partial Least Square (PLS), dan menguji pengaruh interaksi dengan Regresi Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengantisipasi terjadinya faktor kontinjensi berupa turbulensi anggaran dalam menjamin efektivitas penganggaran, apalagi turbulensi anggaran ini mempengaruhi hubungan antara pengendalian anggaran yang ketat dengan penyimpangan anggaran. Dan manfaatnya bagi UNNES, dengan penelitian ini suatu perguruan tinggi juga memerlukan pengendalian anggaran yang ketat dalam bentuk lembaga agar tidak terjadi turbulensi anggaran, meskipun sudah ada Renstra dan Renop.

Kata Kunci: *Kontrol Anggaran, Turbulensi Anggaran, Perilaku Ekonomi*

Abstract

This study aims to provide recommendations regarding the level of tightness/flexibility of budget control applied to the Semarang city government, so that budget deficits or surpluses can be avoided and budget performance improved. Data were obtained through several methods, namely surveys with questionnaires and observations as well as data verification of budget archives and budget realization reports and macroeconomic data from the Central Bureau of Statistics of Semarang City Government. In addition, the data were analyzed quantitatively and qualitatively. There are three objectives to be achieved in this study, namely 1) To find out whether tight budget control affects budget deviation, 2) Knowing whether tight budget control requires policy in its implementation, and 3) Knowing how closely tight budget control is related to budget turbulence. The population in this study is the Semarang City Government. The sample was purposively selected based on Klassen's regional typology mapping. The data were tested to estimate the measurement model and structural model, using the Partial Least Square (PLS) method, and test the interaction effect with Ordinary Least Square (OLS) Regression. The results of this study can be used to anticipate the occurrence of contingency factors in the form of budget turbulence in ensuring budgeting effectiveness, especially this budget turbulence affects the relationship between tight budget control and budget deviations. And the benefits for UNNES, with this research, a university also requires strict budget control in the form of an institution so that budget turbulence does not occur, even though there are already Renstra and Renop.

Keywords: *Strict Budget Control, Budget Turbulence, Conformity*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan yang baik dan sistematis harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi mewujudkan akuntabilitas, efisiensi, penciptaan lapangan kerja, transparansi, pemberdayaan kapasitas, potensi, dan tata cara pembangunan secara efisien dan terpadu (Nur, 2022). Selain itu, pengelolaan keuangan di pemerintah pusat dan daerah, khususnya pengelolaan keuangan desa secara terpadu, lebih didasarkan pada pendekatan pemenuhan hak-hak dasar dan tata cara pembangunan yang baik (et al., 2022). Penganggaran diyakini sebagai pilihan yang rasional, terjangkau, dan bebas politik. Dalam praktiknya, penganggaran sangat erat kaitannya dengan politik, yang memerlukan tawar-menawar di antara berbagai kekuatan yang memiliki kewenangan untuk memutuskan mana yang penting dan mana yang tidak penting (penganggaran adalah kekuatan dan politik) (Koswara et al., 2023)

Permasalahan penganggaran di sektor publik, khususnya organisasi pemerintah, terus berlanjut pada tahap pelaksanaan yang erat kaitannya dengan pengendaliannya (ORDU & Dr. Imaowaji Ejitogute Thomas, 2023). Eksekusi anggaran yang ideal adalah yang

berimbang, sehingga pemerintah daerah sebisa mungkin menghindari terjadinya surplus anggaran apalagi deficit (Dahlia Tanur et al., 2022). Surplus anggaran di tingkat pemerintah daerah bukanlah sebuah prestasi (Mutiarin et al., 2020). Hal ini justru menimbulkan pertanyaan mengenai ketidakmampuannya dalam menyusun anggaran dan ketidakdisiplinan dalam melaksanakan anggaran dalam bentuk program kerja atau kegiatan (Name et al., 2021). Defisit anggaran sangat sulit dibiarkan oleh pemerintah daerah, karena proses revisi anggaran untuk meningkatkan alokasi sumber daya memerlukan proses yang panjang dan kaku (Erlangga, 2023). Oleh karena itu, penyimpangan anggaran merupakan hal yang sangat krusial untuk dikendalikan oleh pemerintah daerah (Seregig et al., 2021). Kegagalan dalam pengendalian anggaran akan berdampak pada pencapaian kinerja tahun berjalan dan penyusunan anggaran pada tahun mendatang (Alsya et al., 2022). Permasalahan lain yang dihadapi pemerintah daerah adalah ketersediaan sumber daya yang seringkali berfluktuasi dari tahun ke tahun (Zulfaturrohmah et al., 2022). Fluktuasi tersebut mungkin disebabkan oleh perkembangan lingkungan perekonomian mikro dan makro, termasuk perubahan kebijakan pemerintah, seperti: kebijakan fiskal, kebijakan moneter, prediksi pendapatan dari pelayanan publik, dan lain-lain. Situasi ini dikenal sebagai turbulensi anggaran (Al Faqih, 2020).

Kajian ini mengkhususkan fungsi Pengendalian Anggaran yang Ketat (KBK) dalam menurunkan deviasi keuangan pada pemerintah daerah yang menghadapi gejolak dalam lingkungan keuangan berupa konversi anggaran, yaitu perubahan target, batasan belanja, prioritas, dan tingkat kinerja. Hal ini sesuai dengan kondisi proses penganggaran berbasis kinerja yang diterapkan pada pemerintah daerah di Indonesia. Jadi turbulensi anggaran merupakan faktor kontingensi yang mempengaruhi peran KBK dalam mengendalikan penyimpangan anggaran (Rehman et al., 2023). OSP (dalam hal ini pemerintah daerah) merupakan setting yang tepat untuk menguji jenis interaksi teori kontingensi, karena memiliki ciri khusus yaitu persaingan yang relatif lebih sedikit, konflik kepentingan, dan melibatkan proses politik dan demokrasi (Hasid et al., 2022). Kajian ini juga merupakan reaksi terhadap perlunya kajian yang lebih besar mengenai dampak luar biasa dari pengendalian keuangan, kini tidak hanya fokus pada dampak disfungsi pengendalian keuangan, termasuk perilaku para aktor yang terlibat dalam pengelolaan keuangan.

Berdasarkan perkembangan indikator perekonomian Pemerintah Kota Semarang seperti tersaji pada Tabel 1.1, terlihat bahwa laju pertumbuhan PDRB sebenarnya mengalami fluktuasi. Hal ini menunjukkan kondisi makro perekonomian Pemerintah Kota Semarang yang bergejolak yang akan mempengaruhi ketersediaan sumber daya yang dapat dialokasikan pada anggaran Pemerintah Kota Semarang lainnya. Faktor-faktor penyebab

ketimpangan ekonomi antar wilayah tersebut merupakan faktor penentu tersedianya sumber daya yang dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pemerintah daerah. Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi ketersediaan sumber daya anggaran. Analisis pola pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan menggunakan Tipologi Klassen menurut Mardiana dalam (Khalimatus Sangadah et al., 2020).

Tabel 1.

Pendapatan per kapita (ADHB) Kota Semarang Tahun 2015 - 2019

Uraian	Rp (000.000)				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
PDRB ADHB (Juta)	134.205.838,01	147.049.319,76	160.292.032,00	175.421.337,00	191.547.224,26
PDRB ADHK (Juta)	109.110.689,61	115.542.560,57	123.279.892,00	131.317.632,00	140.326.256,85
Proyeksi Penduduk Tengah Tahun (Jiwa-BPS)	1.701.114,00	1.729.083,00	1.757.686,00	1.786.114,00	1.814.110,00
PDRB/Kapita /Th (Juta)	78,89291253	85,0446854	91,19491877	98,21396451	105,5874364

Sumber : Data diolah dari BPS Kota Semarang ,2020

Dari data diatas, maka nominal pendapatan per kapita (dengan memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau inflasi) penduduk Kota Semarang pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 105.587.436,- per orang/tahun. Tren PDRB per kapita yang terus meningkat menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat semakin baik dari tahun ke tahun dengan asumsi pemerataan kesejahteraan. Semua itu juga dapat dilihat secara signifikan pada grafik 2.1 berikut ini:



Sumber : BPS Kota Semarang, 2020 (Data diolah)

Gambar 1. Grafik PDRB Per Kapita Kota Semarang Tahun 2015-2019

Penelitian ini mengelompokkan wilayah-wilayah yang ada di Pemerintahan Kota Semarang, sesuai kategori pada Tipologi Klassen. Penggunaan tipologi Klassen dimaksudkan untuk mengetahui peran pengendalian anggaran yang ketat (KBK) dalam mengurangi penyimpangan anggaran pada pemerintah daerah yang memiliki pola pertumbuhan ekonomi berbeda pada Pemerintah Kota Semarang. Penelitian ini penting dilakukan karena beberapa motivasi sebagai berikut: (1) Turbulensi (ketidakstabilan) mengenai ketersediaan sumber daya untuk menyiapkan anggaran yang dihadapi

Pemerintah Kota Semarang dapat mengancam efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengantisipasi terjadinya faktor-faktor kontingen tersebut dalam menjamin efektivitas penganggaran, terutama ketika turbulensi anggaran ini mempengaruhi hubungan antara pengendalian anggaran yang ketat dan penyimpangan anggaran. (2) Kebijakan pengendalian anggaran yang ketat diperlukan dalam upaya menjamin tercapainya kinerja yang mengutamakan terwujudnya konsep value for money: ekonomis, efisien, dan efektif. Penyimpangan anggaran, baik surplus maupun defisit, sebisa mungkin dihindari, karena keduanya merupakan permasalahan bagi Pemerintah Kota Semarang.

Permasalahan yang sering dihadapi dalam penyusunan dan realisasi anggaran adalah penentuan sumber daya yang tersedia yang akan digunakan dalam penyusunan anggaran, yaitu sisi rencana anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan sangat bergantung pada ketersediaan sumber pendapatan daerah, kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah daerah, dan kondisi makroekonomi lainnya (Mamuaja et al., 2021). Jadi jumlah sumber daya yang tersedia untuk dianggarkan selalu berfluktuasi dari tahun ke tahun. Hal inilah yang disebut Boyne dan Meier (2009) sebagai kondisi turbulensi anggaran. Turbulensi anggaran tidak hanya terlihat dari ketersediaan sumber daya yang berfluktuasi. Penganggaran berbasis kinerja yang diikuti dengan penggunaan pemerintah daerah menutup kemungkinan penganggaran berbasis inkrementalisme. Target, batas pengeluaran, prioritas, dan rentang kinerja harus ditetapkan berdasarkan target kinerja keseluruhan pada tahun yang bersangkutan, yang mungkin lebih baik dari tahun sebelumnya. Bahkan dimungkinkan untuk menerapkan penganggaran berbasis nol, mengingat evaluasi kebutuhan dan prioritas hobi ditentukan untuk setiap tahun anggaran. Situasi ini juga berdampak pada meningkatnya gejolak anggaran yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang.

Turbulensi anggaran merupakan faktor kontingensi dalam hubungan Pengendalian Anggaran yang Ketat (KBK) dengan penyimpangan anggaran (Nkundabanyanga et al., 2023). Teori kontingensi mendominasi penelitian di bidang perilaku organisasi, perencanaan, pengukuran kinerja dan manajemen strategis (Marthin & Saebani, 2022). Teori ini memiliki dalil bahwa hasil organisasi merupakan dampak dari dua faktor atau lebih secara bersamaan. Alasan untuk mengasumsikan hubungan kontinjensi dan bukan hubungan universal antara CBC dan deviasi anggaran adalah bahwa situasi tersebut mungkin memerlukan pengendalian anggaran yang lebih ketat atau lebih longgar dalam proses pengendalian anggaran. Kunci untuk memahami dampak kontinjensi ini adalah

kemungkinan perbedaan yang diperlukan untuk memberikan arahan dalam organisasi (Muhajir et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan analisis kuantitatif. Data dikumpulkan dari beberapa sumber. Sumber pertama merupakan sumber data primer yang berasal dari responden penelitian dengan menggunakan kuesioner untuk memperoleh data tentang ketatnya pengendalian anggaran pada Pemerintah Kota Semarang. Responden adalah seluruh kepala kantor di lingkungan Pemerintahan Kota Semarang yang dijadikan sampel penelitian. Sumber data lainnya adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Pemerintah Kota Semarang dan data anggaran serta laporan keuangan (khususnya laporan realisasi anggaran).

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang disebar secara online. Untuk menunjang objektivitas penelitian, identitas sampel tidak akan dicantumkan. Kuesioner akan disusun menggunakan skala likert dengan 5 tingkatan yaitu: sangat setuju (SS), tidak setuju (KS), netral (N), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). Pemberian skor pada setiap jawaban bernilai 5 untuk jawaban SS, dan 1 untuk jawaban STS. Pengendalian Anggaran yang Ketat (KBK) dioperasionalkan dan diukur dengan konstruk yang digunakan oleh Johansson dan Siverbo (2014): (a) Penekanan pada pencapaian anggaran (emphasis), (b) Memiliki kepentingan rinci terhadap item baris anggaran (detail), (c) Tidak mudah mentoleransi penyimpangan anggaran (deviate) dan (d) Mengkomunikasikan secara intensif hal-hal yang berkaitan dengan anggaran (intensitas).

Deviasi anggaran, dioperasionalkan sebagai perbandingan antara anggaran dan realisasi. Jika deviasi anggaran bernilai positif berarti realisasinya lebih kecil dari anggarannya, begitu pula sebaliknya. Responden diminta memberikan penilaian sesuai dengan kondisi yang dialami responden. Turbulensi anggaran dioperasionalkan sebagai perbandingan antara sumber daya yang tersedia untuk dianggarkan pada tahun n dengan realisasi anggaran pada tahun $n-1$ (Supriadi & Huseini, 2020). Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa survei dan observasi dokumen.

Metode survei digunakan untuk mengukur ketatnya pengendalian. Pengendalian anggaran menggunakan kuesioner yang diadopsi dari Johansson dan Siverbo dalam (Fitriyani & Herawati, 2019), yang berasal dari konstruk KBK yang dikembangkan oleh Van der Stede. Observasi dokumen dilakukan terhadap laporan anggaran dan realisasi, kemudian diverifikasi dengan data yang diperoleh dari survei. Penggunaan berbagai metode dalam pengumpulan data dapat meminimalkan atau menghindari metode yang

umum (Jordan & Troth, 2020). Populasinya mencakup seluruh wilayah di Kota Semarang dengan pengelompokan berdasarkan tipologi Klassen.

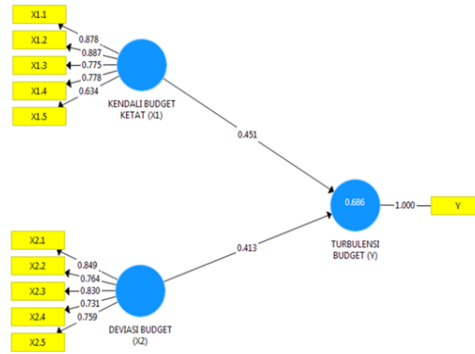
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan urutan sebagai berikut:

1. Menguji reliabilitas dan validitas model pengukuran CBC (Khoiriyah et al., 2019). Reliabilitas diukur dengan Composite Reliability dan Average Variance Extracted (AVE) untuk keempat konstruk KBK. Kriterianya adalah jika reliabilitas kompositnya lebih besar dari 0,7 dan AVE lebih besar dari 0,5 berarti reliabel. Validitas diukur dengan menggunakan nilai loading factor dari variabel laten CBC yaitu Detail, Deviate, Intensity, dan Emphasis. Kriteria tersebut valid jika faktor pemuatannya lebih besar dari 0,6.
2. Pengujian model: Metode Partial Least Square (PLS) untuk mengestimasi model pengukuran dan model struktural (Marliana, 2019). Software SmartPLS digunakan untuk membantu pengolahan data. Kriteria Uji Goodness of Fit (GoF): jika $GoF > 0,36$ berarti model mempunyai daya prediksi/penjelasan yang baik.
3. Pengujian hipotesis dan model struktural termasuk efek interaksinya, menggunakan Regresi Ordinary Least Square (OLS) (Riswan et al., 2021), dengan menggunakan pendekatan dua tahap:
 - Tahap I: estimasi model yang mencakup pengaruh langsung dan utama variabel bebas (KBK) terhadap variabel terikat (Penyimpangan Anggaran).
 - Tahap II: model estimasi yang sama seperti Tahap I, namun dengan menambahkan interaksi antara turbulensi anggaran dan KBK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Instrumen Tes

Kriteria uji validitas dalam suatu penelitian mengacu pada besarnya outer loading setiap indikator pada variabel laten. Tes tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 2. Structural Equation Modeling (SEM)

Hasil Uji Kelayakan

Hasil Model Luar (Model Pengukuran)

1. Uji Validitas Konvergen

Validitas konvergen digunakan untuk menghitung validitas indikator reflektif berupa derajat variabel yang dapat dilihat dari muatan luar setiap indikator. variabel. Jika harga pembebanan luar diatas 0,70 maka alat dinyatakan mempunyai keandalan yang baik (Sarwono, 2020). Harga pemuatan luar yang diinginkan adalah 0,50 dan di bawah harga 0,50 mungkin be excluded from the analysis (Ghozali, 2020).

Tabel 2. Outer Loading Results

Indicator	Latent Variable Score	T Statistic	Loading Limit	Description
X1.1	0,878	19,496	0,5 – 0,6	Valid
X1.2	0,887	11,177	0,5 – 0,6	Valid
X1.3	0,775	5,420	0,5 – 0,6	Valid
X1.4	0,778	10,104	0,5 – 0,6	Valid
X1.5	0,634	5,664	0,5 – 0,6	Valid
X2.1	0,849	12,714	0,5 – 0,6	Valid
X2.2	0,764	9,920	0,5 – 0,6	Valid
X2.3	0,830	4,431	0,5 – 0,6	Valid
X2.4	0,731	4,261	0,5 – 0,6	Valid
X2.5	0,759	11,599	0,5 – 0,6	Valid
Y	1,000	1,000	0,5 – 0,6	Valid

Sumber: Hasil Olahan PLS, 2022

2. Validitas Diskriminasi

Kriteria untuk mengukur validitas diskriminan setiap rakitan dengan korelasi antar rakitan dan konstruk lain dalam versinya adalah dengan menggunakan evaluasi Average Variance Extracted (AVE). jika biaya AVE untuk setiap perakitan lebih besar daripada korelasi antar konstruksi yang berbeda, maka versi tersebut memiliki validitas diskriminan yang

cukup.

Tabel 3. Discriminant Validity Result

	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
X1	0,621
X2	0,633
Y	1,000

Sumber: Hasil Olahan PLS, 2022

Berdasarkan hasil uji validitas diskriminan terlihat bahwa konstruk AVE pada variabel X1, X2, dan Y menunjukkan nilai AVE telah melebihi ketentuan 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai konstruk pada variabel X1, X2, dan Y menunjukkan nilai AVE telah melebihi ketentuan 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai konstruk pada variabel penelitian mempunyai nilai validitas diskriminan yang baik.

3. Keandalan Komposit

Reliabilitas komposit digunakan untuk mengukur reliabilitas konstruk. Reliabilitas komposit mencerminkan reliabilitas jika seluruh indikator dalam model memiliki nilai minimal 0,7.

Tabel 4. Composite Reliability Result

Variable	Composite Reliability	Criteria
X1	0,891	0,7
X2	0,895	0,7
Y	1,000	0,7

Sumber: Hasil Olahan PLS, 2022

Tabel tersebut menunjukkan nilai indikator reliabilitas komposit untuk variabel X1, X2, dan Y lebih besar dari nilai standar yaitu 0,70 yang berarti indikator-indikator dalam model dapat digunakan untuk mengungkap data aktual suatu objek.

4. Inner Model Result

Tabel 5. Path Equation Partial Least Square (PLS)

	<i>Original Sample</i>	<i>Sample Mean</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>T Statistics</i>
X1 -> Y	0,413	0,430	0,176	2,347
X2 -> Y	0,451	0,451	0,177	2,551

Sumber: Hasil Olahan PLS, 2022

Hasil persamaan jalur model diatas dapat diinterpretasikan: nilai original sample untuk variabel X1 dan X2 terhadap Y mempunyai nilai parameter positif sebesar 0,413 (X1) dan 0,451 (X2) yang memberikan pengertian bahwa semakin tinggi pengendalian anggaran dan anggaran yang ketat. penyimpangan, semakin rendah turbulensi anggaran.

5. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan pengujian yang menjelaskan pengaruh keterikatan variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 6. Pengujian Hipotesis Partial Least Square (PLS).

	<i>T Statistics</i>	<i>P Values</i>
X1 -> Y	2,347	0.019
X2 -> Y	2,551	0.011

Sumber: Hasil Olahan PLS, 2022

Berdasarkan hasil pengujian, nilai T statistik variabel X1 dan X2 telah melebihi nilai T tabel sebesar 1,96, artinya pengaruh pengendalian anggaran yang ketat dan penyimpangan anggaran berpengaruh signifikan terhadap turbulensi anggaran.

6. R square

R square berfungsi untuk mengetahui seberapa besar variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Berikut hasil tesnya:

Tabel 7. Nilai R Kuadrat

	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>
Y	0,686	0,663

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa pengaruh indikator variabel X1 dan X2 terhadap Y memberikan nilai sebesar 0,663 yang dapat diartikan bahwa pengaruh variabel konstruk turbulensi anggaran dapat dijelaskan oleh variabel konstruk pengendalian anggaran yang ketat dan anggaran deviasi sebesar 66,3%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar itu diteliti.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa pengendalian anggaran yang ketat berpengaruh terhadap penyimpangan anggaran dan turbulensi anggaran menurut pengelompokan Tipologi Klassen, sehingga pengendalian anggaran semakin ketat jika penyimpangan anggaran semakin kecil. Jika diuji secara terpisah, turbulensi tidak berpengaruh terhadap penyimpangan anggaran, namun bila diinteraksikan dengan KBK pengaruhnya signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dihadapi tidak

mengakibatkan terjadinya penyimpangan anggaran. Tingkat ketatnya pengendalian anggaran menjadi faktor utama penyimpangan anggaran.

Kebijakan pengendalian anggaran yang ketat sangat diperlukan dalam upaya menjamin tercapainya kinerja yang mengutamakan perwujudan konsep value for money: ekonomis, efisien, dan efektif. Penyimpangan anggaran, baik surplus maupun defisit sebisa mungkin dihindari, karena keduanya bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Faqih, N. I. H. (2020). Peran Lembaga Filantropi Islam Dalam Menanggulangi Turbulensi Ekonomi Masyarakat Dalam Situasi Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 4, 152–166. <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01>
- Alsya, J., Widiyawati, R., & Wardono, H. (2022). Analisis Dampak Signifikan Optimalnya Kinerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dalam Mempengaruhi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. *Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)*, 2(2). <https://doi.org/10.23960/snip.v2i2.315>
- Dahlia Tanur, Syamsuri Rahim, & Muhammad Su'un. (2022). Implikasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) Serta Anggaran Berbasis Kinerja Selama Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Journal Accounting Finance (Jaf)*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33096/jaf.v3i1.923>
- Erlangga, R. G. (2023). *Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Untuk Mengatasi Defisit Anggaran (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2021)*.
- Fitriyani, N., & Herawati, H. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah). *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 2(2), 19. <https://doi.org/10.32663/jaz.v2i2.989>
- Hasid, Z., Noor, A., & Kurniawan, E. (2022). Ekonomi Sumber Daya Alam Dalam Lensa Pembangunan Ekonomi. In *Books.Google.Com*.
- Jordan, P. J., & Troth, A. C. (2020). Common method bias in applied settings: The dilemma of researching in organizations. *Australian Journal of Management*, 45(1), 3–14. <https://doi.org/10.1177/0312896219871976>

- Khalimatus Sangadah, S., Togar Laut, L., Jalunggono, G., & Ekonomi, F. (2020). DINAMIC : Directory Journal of Economic Volume 2 Nomor 1. *The Influence of Factor That Cause Poverty in Kebumen, 2*, 2009–2018.
- Khoiriyah, R., Shodikin, A., & Haryono, H. E. (2019). Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Melalui Model Pembelajaran Inside Outside Circle (Ioc) Dengan Menggunakan Media Cbc (Cube Beam Color). *Inspiramatika*, 5(1), 22–33. <https://doi.org/10.52166/inspiramatika.v5i1.1749>
- Koswara, E., Pascasarjana, M., Manajemen, M., & Winaya, U. (2023). *Nalysis Of The Macro Environment And Analysis Of The Fivesforces In The Retail Industry In Indonesia*. 5(3), 216–223. <https://doi.org/https://doi.org/10.32938/ie.v5i4.5115>
- Mamuaja, J., Kawatu, F. S., & Kambey, A. (2021). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 7(1), 249–258. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1221>
- Marliana, R. R. (2019). Partial Least Square-Structural Equation Modeling Pada Hubungan Antara Tingkat Kepuasan Mahasiswa Dan Kualitas Google Classroom Berdasarkan Metode Webqual 4.0. *Jurnal Matematika, Statistika Dan Komputasi*, 16(2), 174. <https://doi.org/10.20956/jmsk.v16i2.7851>
- Marthin, A., & Saebani, A. (2022). Pengaruh Penerapan Total Quality Management (TQM), Sistem Pengukuran Kinerja, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 1(1), 1–19.
- Muhajir, N. M. N., Zohriah, A., & Fauzi, A. (2022). Model Kepemimpinan Kontigensi dalam Pengolaan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(2), 4698–4703. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.14210>
- Mutiarin, D., Fathani, A. T., Sakir, S., & Atmojo, M. E. (2020). Performance-Based Budgeting Review from Local Government Budget: West Sumatra in 2017-2018. *Journal of Governance and Public Policy*, 7(3), 191–202. <https://doi.org/10.18196/jgpp.73133>
- Name, C., Name, T., Revd, R. T., Lungile, L., World Economic Forum, Fitzpatrick, T., Modeling, L. M., Measurement, F., Snowrift, O. N., Environmental, A. R., Regional, S. S., Power, E., Limited, G. C., Influence, T. H. E., Snow, O. F., On, F., Around, S., Embankment, T. H. E., Wind, I. N., ... End, F. Y. (2021). Pengelolaan Anggaran Dalam Meningkatkan Kualitas Sekolah Di Smk Negeri 1 Mesjid Raya Aceh Besar. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(2), 6.
- Nkundabanyanga, S. K., Jayasinghe, K., Abaho, E., & Mugambe, K. (2023). Contingency factors and budget actors' behaviour during COVID-19: the case of Uganda. *Journal*

- of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 35(3), 354–384.
<https://doi.org/10.1108/JPBAFM-03-2021-0058>
- Nur, H. (2022). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Diperintahkan Wali Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat). *Skripsi*.
- ORDU, P. A., & Dr. Imaowaji Ejitogute Thomas. (2023). *Public Sector Budgets: Types , Processes , Implementation and Controls; Issues and Prospects Original Research Article Public Sector Budgets: Types , Processes , Implementation and Controls; Issues and Prospects. November*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10145065>
- Rehman, S. U., Elrehail, H., Nair, K., Bhatti, A., & Taamneh, A. M. (2023). MCS package and entrepreneurial competency influence on business performance: the moderating role of business strategy. *European Journal of Management and Business Economics*, 32(1), 1–23. <https://doi.org/10.1108/EJMBE-04-2020-0088>
- Riswan, Y. F., Grahita, C., & Edi, S. (2021). Model struktural untuk memprediksikan kepuasan dan kinerja pengguna SIKD pada organisasi pemerintah di Kalimantan Selatan. *Jurnal Pekommas*, 13–24. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2021.2060102>
- Salam, M., Abd Rahman, M. F., Syed Yusuf, S. N., Said, J., & Jaya, W. K. (2022). An Institutional Explanation of the Role of Legislature Accountability in Local Government Budgetary Decision-Making. *Asia-Pacific Management Accounting Journal*, 17(3), 139–167. <https://doi.org/10.24191/apmaj.v17i3-06>
- Seregig, I. K., Hartono, B., & Ndari, Y. (2021). Policy on Overcoming Village Budget Deviations By the Government Internal Supervisory Apparatus in Indonesia (Case Study of Tanjungsari Village, Lampung). *Cepalo*, 5(1), 23–38. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v5no1.2211>
- Supriadi, H., & Huseini, M. (2020). Inovasi Dilingkungan Di Kementerian Sekretariat Negara RI Dilihat Dari Perspektif Knowledge Management. *Reformasi Administrasi*, 7(2), 63–79. <https://doi.org/10.31334/reformasi.v7i2.1056>
- Zulfaturrohmah, F., Pungky, J., Widagdo, W., & Abiprayu, K. B. (2022). *STRICT BUDGET CONTROL ON THE GOVERNMENT OF THE CITY OF SEMARANG IN FACING BUDGET TURBULENCE. August*, 160–166.